

PANDUAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Seri I

Peran, Prinsip, dan Kode Etik



**PANDUAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA
DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT**

Seri I

Peran, Prinsip, dan Kode Etik

Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

2024

**PANDUAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA DALAM
PENDAMPINGAN MASYARAKAT**

Seri I

Peran, Prinsip, dan Kode Etik

Jakarta: PEKKA 2024

Tim Penyusun:

Sri Wiyanti Eddyono
Fitria Villa Sahara
Nunik Sri Harini
Annisa Ayuningtyas
Erma Nuzulia Syifa
Jennifer

Layout & Cover
Tim LGS UGM

Ukuran: 21 x 29,7 cm

Cetakan Pertama, Januari 2024

ISBN: xxxxxxx

Penerbit

Yayasan Pemberdayaan PEKKA
Jalan Pangkalan Jati V No.3, RT.11/RW.5, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

bekerjasama dengan
Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Kata Pengantar

Yayasan PEKKA telah menjalankan Program Pemberdayaan Hukum Perempuan sejak tahun 2005 untuk mengatasi ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dan komunitas marginal. Program ini melatih perempuan kepala keluarga yang juga sebagai penyintas kekerasan sebagai Paralegal Komunitas untuk mendorong pemberdayaan hukum dalam masyarakat. Paralegal Komunitas ini memainkan peran penting dalam menjangkau perempuan dan anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di desa-desa terpencil dan menghadapi kemiskinan, untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka dan mengakses keadilan. Paralegal Pekka juga membantu menyelesaikan kasus-kasus yang berdampak pada perempuan dan komunitas marginal.

Menyadari pentingnya peran mereka, Yayasan PEKKA bersama Pusat Kajian *Law, Gender and Society* (LGS) Fakultas Hukum UGM, menyusun "Panduan dan Standar Prosedur Operasional Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat" yang terdiri dari 6 (enam) seri yang berfungsi sebagai instrumen refleksi, pemantauan dan evaluasi terhadap kapasitas peran dan praktik Paralegal Komunitas Pekka agar selaras dengan ketentuan peraturan perundangan serta prinsip dan nilai keadilan gender serta akuntabilitas publik. Panduan dan SOP Seri I "Peran, Prinsip dan Kode Etik" ini mendefinisikan peran Paralegal Komunitas Pekka serta prinsip dan kode etik untuk memastikan pemberian layanan informasi dan pendampingan hukum secara efektif dan etis. Panduan ini juga mengarahkan interaksi mereka dengan masyarakat, klien, pihak berwenang, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi individu yang terpinggirkan, menghormati keberagaman, dan prinsip akuntabilitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

- Fitria Villa Sahara (Co-Director PEKKA)

Salah satu isu strategis dan program prioritas Pusat Kajian *Law, Gender and Society* (LGS) Fakultas Hukum UGM adalah menyokong pemberdayaan hukum masyarakat dalam rangka penguatan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat marjinal. LGS menyadari bahwa perempuan kepala keluarga merupakan salah satu kelompok marjinal yang membutuhkan pemberdayaan hukum. Pemberdayaan hukum perempuan marjinal bertujuan untuk penyadaran hak-hak, baik sebagai warga negara maupun sebagai perempuan. Pengetahuan terhadap hak akan berpengaruh terhadap jalan yang dipilih ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Perempuan yang sadar akan hanya akan lebih mampu mencari strategi dalam mengakses keadilan. Pertimbangan inilah yang mendorong LGS mendedikasikan waktunya, bekerja sama dengan PEKKA dalam rangka memperkuat Paralegal Komunitas Pekka melalui penyusunan "Panduan dan Standar Prosedur Operasional Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat".

Panduan dan Standar Prosedur Operasional ini disusun sebagai pegangan bagi Paralegal Komunitas Pekka dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang telah berjalan, kemudian merefleksikannya kembali pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip, dan larangan dalam pendampingan masyarakat. Panduan dan Standar Prosedur Operasional ini terdiri dari 6 (enam) seri dengan titik fokus yang berkesinambungan, mulai dari penegasan peran Paralegal Komunitas Pekka dalam pendampingan masyarakat; gambaran alur pendampingan; hingga prosedur pendampingan administrasi, pendampingan kasus yang berdimensi perdata maupun pidana, serta perwalian anak. "Seri I: Peran, Prinsip, dan Kode Etik" menjadi pengantar sekaligus dasar bagi penyusunan alur dan prosedur pendampingan masyarakat.

- Sri Wiyanti Eddyono (Ketua LGS)

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Kamus Kecil	5
Mengapa Panduan dan Standar Prosedur Operasional ini disusun?	7
Apa tujuan penyusunan Panduan dan Standar Prosedur Operasional ini?	8
Siapa yang dapat menggunakan Panduan dan Standar Prosedur Operasional ini?	8
Apa yang dimaksud dengan paralegal? Apa yang dimaksud dengan paralegal komunitas?	9
Peran Paralegal Komunitas Pekka	10
Dasar Hukum Peran Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat	11
Siapa yang bisa menjadi Paralegal Komunitas Pekka?	12
Hak dan Kewajiban Paralegal	13
Peran Paralegal Komunitas Pekka dalam Mendampingi Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perlindungan Sosial	14
Peran Paralegal Komunitas Pekka dalam Mendampingi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	15
Peran Paralegal Komunitas Pekka sebagai Pendamping Korban Kekerasan Seksual	15
Peran Paralegal Komunitas Pekka sebagai Relawan Pendamping Korban KDRT	16
Peran Paralegal Komunitas Pekka sebagai Relawan Pendamping Korban Perdagangan Orang	17
Peran Paralegal Komunitas Pekka dalam Perwalian Anak	18
Peran Paralegal Komunitas Pekka dalam Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	18
Prinsip Pendampingan Masyarakat oleh Paralegal Komunitas Pekka	19
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat	20
Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Paralegal Komunitas Pekka dalam Pendampingan Masyarakat	21
Referensi	22